Praktik Perbudakan di Era Globalisasi, Salah Siapa?

Jamal Wiwoho
Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret/ Pembantu Rektor II UNS

KOTA Tangerang yang merupakan kawasan industri dan permukiman padat penduduk awalnya tenang, tapi mendadak menjadi sorotan media massa baik nasional maupun internasional. Hal itu terjadi sebagai akibat dari penggerebekan yang dilakukan Polresta Tangerang pada 3 Mei 2013 terhadap sebuah perusahaan pengolahan limbah menjadi aluminium balok dan kuali yang berada di Kampung Bayur Opak, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang, yang dipimpin YK. Sebuah perlakuan yang memilukan dialami sekitar 25 buruh (yang mestinya digunakan dengan istilah tenaga kerja. Dalam tulisan ini saya gunakan dengan istilah 'buruh' untuk menggambarkan betapa tidak manusiawinya perlakuan terhadap tenaga kerja di perusahaan tersebut).

Awal terbongkar 'tragedi buruh' itu bermula dari kaburnya dua buruh dari sekapan dan melapor kepada Kontras dan Komnas HAM. Laporan itu ditindaklanjuti dengan penggerebekan pada lokasi penyekapan terhadap 25 buruh yang di antaranya anak-anak yang berasal dari Lampung, Bandung, dan Cianjur.

Ada beberapa hal yang tidak lazim di era globalisasi, kebebasan, dan keterbukaan serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia ini dalam tragedi buruh tersebut, antara lain kerja paksa, disiksa, dipukuli, disiram timah panas, disulut rokok, dan disekap di dalam pabrik, serta sebagai akibat dari pengolahan limbah, buruh mengalami gatal-gatal, badan kurus, rambut kaku, luka pukulan, luka air timah, asma, batuk-batuk, kadas dan kutu air, serta trauma.

Di samping beberapa hal yang tidak manusiawi tersebut, ternyata masih ditambah dengan tindakan-tindakan yang tidak kalah keji, misalnya eksploitasi jam kerja buruh lebih dari 16 jam karena dimulai pukul 05.30 sampai pukul 22.00 WIB lebih, buruh tidak digaji dengan standar upah minimum kabupaten (UMK), ruang istirahat yang amat sempit dan pengap, serta terisolasinya buruh dengan lingkungan sekitar.

Bila melihat beberapa kekejian majikan terhadap para buruh tersebut, ada suatu pertanyaan besar di benak kita, antara lain bagaimanakah perlindungan hukum dan penegakan hukum atas undang-undang ketenagakerjaan kita? Salah siapakah peristiwa kekerasan fisik dan nonfisik kepada para buruh tersebut? Seperti diketahui dengan jelas, dalam Pasal 5 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa 'Setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat'.

Pasal 6 UU No 13 Tahun 2003 mewajibkan pengusaha memenuhi kewajibannya atau memberikan hak (misalnya upah, berserikat, berkumpul, rasa nyaman, keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan kerja) kepada para tenaga kerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik mereka.

Dengan memperhatikan ketentuan UU Ketenagakerjaan tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan kelalaian atas tiga perlindungan pokok terhadap tenaga kerja. Pertama, perlindungan secara ekonomi, yakni diharapkan para tenaga kerja akan diberi imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan-tunjangan yang sesuai dengan perjanjian kerja atau minimal dengan UMK. Kedua, perlindungan sosial, yakni setiap tenaga kerja diberi kesempatan luas untuk mendapatkan kesehatan, rasa aman, dapat berserikat dan berkumpul dengan menjadi anggota pada serikat/serikat-serikat tenaga kerja di dalam dan di luar perusahaan. Ketiga, adanya perlindungan teknis yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan kerja serta kesehatan kerja.

SENO

Di samping ketiga perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut masih ada beberapa perlindungan yang harus dipahami dan dilaksanakan pengusaha, antara lain norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, dan norma kecelakaan kerja. Di samping itu, beberapa perlindungan tenaga kerja yang tidak boleh diabaikan antara lain perlindungan jaminan sosial tenaga kerja (sesuai dengan UU No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja/ Jamsostek), perlindungan atas keselamatan dan kesehatan, serta perlindungan atas upah.

Dengan melihat cukup banyaknya cakupan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, para pelaku/pimpinan perusahaan pengolahan limbah menjadi kuali di Tangerang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dengan pasal berlapis menggunakan tiga macam tindak pidana. Yaitu, tindak pidana penghilangan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP) dengan ancaman hukuman 8 tahun pidana penjara, tindak pidana penganiayaan berat (Pasal 351 (1) dengan ancaman hukuman 5 tahun pidana penjara, dan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 2 UU No 21 Tahun 2007) dengan ancaman hukuman 15 tahun pidana penjara.

Di samping penegakan secara hukum ketenagakerjaan dan hukum pidana, tampaknya permasalahan tragedi buruh kuali itu juga bisa terjadi karena beberapa hal. Itu antara lain, pertama, lemahnya pengawasan instansi tenaga kerja baik dari dinas tenaga kerja, Kemenakertrans, maupun pemerintah pusat. Harus diakui, meledaknya tragedi buruh itu sebagai bentuk kelalaian pemerintah dalam melindungi tenaga kerja sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman serta kesehatan. Dengan adanya kasus tersebut, pemerintah diharapkan terdorong untuk lebih melindungi tenaga kerja secara materiil, bukan formal semata.

Kedua, posisi tawar yang rendah dari buruh. Harus diakui, buruh yang pada umumnya hanya mengandalkan tenaganya dalam bekerja secara normatif berkedudukan sederajat/ seimbang dengan pengusaha. Namun secara faktual, itu tidak sama dan tidak mungkin sama. Banyak kesewenang-wenangan pengusaha dengan dalih bahwa pengusaha selalu dalam posisi tawar yang kuat, sedangkan buruh lemah. Pengusaha selalu memegang kendali dan berkuasa sehingga akan menyulitkan buruh untuk mempunyai kedudukan yang seimbang.

Ketiga, adanya dugaan keterlibatan aparat. Walau tidak gampang dibuktikan, banyak fakta memperlihatkan kedekatan pengusaha dengan aparat keamanan, yang kewenangannya sering kali disalahgunakan. Misalnya untuk membekingi usaha bisnis pengusaha, aparat digunakan untuk menakut-nakuti buruh yang sedang berselisih dll. Keempat, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang lemah. Banyak orang mengamini pernyataan yang mengatakan hukum akan tumpul dan tak berdaya manakala berhadapan dengan orang yang kuat (penguasa) dan hukum akan kuat dan tajam menghunjam manakala berhadapan dengan orang yang lemah (buruh).

Oleh karena itu, tidak salah kiranya ungkapan serupa dengan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan akan lemah manakala aparat penegak hukum berhadapan dengan orang yang kuat dan sebaliknya.

Untuk mengakhiri tulisan ini, kasus 'praktik perbudakan' di Tangerang, Banten, tersebut agar segera dituntaskan secara pasti, adil, dan transparan sehingga ke depan tidak ada lagi jeritan, rintihan, dan tangisan buruh serta 'kesetaraan' hak antara buruh dan para pengusaha dapat dicapai. Semoga.

Politik Kemasan

Benny Susetyo Pr
Budayawan

KUALITAS partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2014 sangat menentukan arah parlemen dan kebijakan politik, ekonomi, serta dimensi lainnya di Indonesia pasca-2014. Berdasarkan daftar caleg yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejumlah partai masih buruk secara administrasi dalam mempersiapkan caleg. Kualitas caleg pun, jika dikaji lebih dalam, menyimpan sejumlah persoalan. Hampir 90% caleg tidak berkualitas. Hal itu menandakan partai politik kehilangan keadaban politik. Politik hanya dimaknai *do ut des*. Berpolitik sekadar sarana mendapatkan transaksi belaka. Inilah yang membuat wajah parlemen tidak berubah karena motivasi mereka menjadi 'caleg' untuk mencari kekuasaan dan uang.

Hal demikian menyuburkan budaya KKN, karena tindakan partai politik mengusung caleg yang merupakan keluarga dekat sebetulnya bentuk nepotisme yang merugikan partai itu sendiri. Banyak efek negatif yang ditimbulkan, misalnya mandeknya kaderisasi partai. Bukan hanya itu, kekhawatiran utama bila saja nanti penguasa terpilih memiliki parlemen yang sebagian anggotanya adalah keluarga dekat, bisa dibayangkan begitu sulitnya melakukan kontrol terhadap kekuasaan.

Lebih dari itu, sebetulnya politik dinasti tidak mencerminkan moralitas demokrasi yang menghendaki adanya ruang kompetisi yang sehat dan *fair*. Politik dinasti ialah sebentuk nepotisme yang sesungguhnya telah kita tolak dan mencederai semangat reformasi. Semangat kekeluargaan dalam politik lebih banyak menghasilkan praktik politik yang tidak sehat. Argumen nepotisme begitu dekat dengan kolusi dan korupsi hingga kini masih diterima dalam sebagian besar alam pikir publik. Nepotisme cenderung memanfaatkan akses politik tertentu untuk kepentingan orang dekat dan keluarga. Hal demikian tidak bisa diterima karena hanya akan melemahkan demokrasi.

Karenanya, logis bila politik dinasti dalam parpol pada akhirnya hanya akan merugikan partai itu sendiri. Apalagi jika hal tersebut dilakukan tanpa rekrutmen yang benar dan lebih banyak mengedepankan unsur nepotisme. Umumnya ada unsur tidak *fair* dalam rekrutmen politik dengan modus nepotisme. Efek lainnya, kader partai akan kehilangan motivasi untuk bekerja keras karena semuanya akan dikendalikan orang kuat partai.

Inilah kecenderungan yang saat ini banyak terjadi di negeri ini. Kerabat yang diusung dalam pencalonan sering kali tidak melewati kaderisasi dan rekrutmen yang benar. Apalagi sudah dipahami bersama bahwa kaderisasi di semua parpol peserta belum terbangun dengan baik. Karenanya saat menjelang pemilu legislatif, justru tokoh-tokoh yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petinggi partailah yang bermunculan.

Faktanya memang sebagian dari mereka mendapatkan kemudahan dan posisi mapan tanpa kerja keras terlebih dahulu. Di sisi lain, banyak kader partai yang mengabdi dari bawah justru tidak memiliki kesempatan untuk berbuat lebih banyak. Ada banyak alasan dalam peristiwa tersebut yang bisa dikemukakan. Misalnya soal kepentingan bisnis, *status quo* kekuasaan, sampai dengan aspek kedekatan secara

> Para elite kita bagai singa sirkus yang lihai memerankan tipu muslihat yang membuai dan menipu penonton.

dinasti. Satu-satunya jalan untuk mengendalikan agar politik dinasti tidak menjadi tren dan tabiat politik di negeri ini ialah dengan melakukan kaderisasi partai. Selain itu rekrutmen harus dilakukan secara adil dan merata terhadap semua anggota partai.

Penuh kepalsuan

Hal lain yang menarik diungkap dalam 'politik caleg' di negeri ini ialah publik umumnya menilai apa yang dilakukan para calon legislatif itu tak lebih dari sebuah politik kemasan. Politik pencitraan diri yang lahir dalam pertarungan merebut simpati publik. Sebagai sebuah citra, sering kali apa yang tampak bukanlah apa yang sesungguhnya ada. Para caleg berhias diri dan tampil memukau di depan khalayak. Namun, lagi-lagi publik mempertanyakan apakah janji yang bertebaran dalam berbagai iklan politik itu bukan sebagai sebuah penipuan--seperti layaknya janji politik yang penuh dengan kepalsuan?

Dalam kenyataannya, sering kali publik hanya disuguhi dengan pertarungan kata tanpa makna yang mendalam. Apa yang tampil tak lebih sebagai sebuah jargon politik, bukan sebagai sebuah visi dan idealisme yang mencerminkan diri elite. Kita bisa memetik pelajaran dari pemilu-pemilu sebelumnya. Para caleg berhias diri dalam gambar partai dan menyatakan diri sebagai sosok paling layak dipilih. Namun pada perjalanan politik sepanjang lima tahun terakhir, jangankan perubahan mendasar yang terjadi dan berpengaruh terhadap kehidupan rakyat secara nyata, justru yang sering terjadi ialah tingkah laku para elite di Senayan yang amat mengecewakan.

Politik 'priyayiisme' itu hidup menggurita di segenap lini pemerintahan dari daerah hingga pusat. Kita hidup dalam sebuah zaman di kala demokrasi, objektivitas, dan rasionalitas disanjung-sanjung, tapi kepatuhan dan keterpaksaan secara tidak masuk akal dipraktikkan. Sebagai elite politik, mereka tak sadar tindak-tanduk dan perilaku mereka selalu menjadi bahan pergunjingan masyarakat. Intinya, rakyat tertipu memiliki wakil rakyat yang demikian. Tertipu dan berulang kali tertipu memiliki pelayan yang suka mencuri uang rakyatnya sendiri. Inilah lingkaran kegelapan yang mewarnai kehidupan politik yang mencerminkan betapa nurani kita sebagai bangsa telah sirna di muka bumi pertiwi ini.

Para elite kita bagai singa sirkus yang lihai memerankan tipu muslihat yang membuai dan menipu penonton. Mereka bagai pemain sulap yang pandai membuat penonton tertawa sekaligus menangis. Mereka pandai menyembunyikan sesuatu 'tanpa terlihat' oleh penonton (tapi penonton sadar bahwa mereka ditipu), dan memperlihatkan sesuatu yang menakjubkan. Buat mereka, berpolitik tak ubahnya seperti memerankan diri sebagai singa yang siap menerkam dengan ganas. Bak pemain sulap itulah, aksi tipu-tipu menjadi konsumsi sehari-hari. Bak pemain sirkus, keganasan politik ditandai dengan maraknya manipulasi nilai-nilai kebenaran.

Caleg berintegritas

Barangkali tidak semua caleg yang memiliki kerabat dengan orang kuat partai merupakan caleg yang tidak berkualitas. Mungkin saja tidak semua caleg yang memiliki kerabat dengan penguasa merupakan sosok yang tidak layak pilih. Namun, yang senantiasa harus dihindari ialah bahwa nepotisme itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, sebab sudah menjadi bawaan manusia sejak lahir. Karena itulah kesadaran untuk membuka akses berpolitik selebar-lebarnya dan transparan menjadi tuntutan utama.

Kompetisi untuk menjadi calon anggota legislatif harus dipusatkan pada program yang terukur bagi kemakmuran masyarakat. Dibutuhkan perubahan budaya dan pola berpikir dari para elite politik untuk mengembangkan visi pemerintahan yang jelas fokusnya. Pola berpikir baru untuk mencapai kesadaran dalam mewujudkan cita-cita membangun kesejahteraan bersama sebagaimana dalam cita-cita republik.

PARTISIPASI OPINI Kirimkan ke email: **opini@mediaindonesia.com** atau **opinimi@yahoo.com** atau fax: **(021) 5812105**, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP)

MEDIA INDONESIA

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm)
Direktur Utama: Lestari Moerdijat
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong
Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Djafar H. Assegaff, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong
Redaktur Senior: Elman Saragih, Laurens Tato
Kepala Divisi Pemberitaan: Kleden Suban
Kepala Divisi Content Enrichment: Gaudensius Suhardi
Deputi Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar
Sekretaris Redaksi: Teguh Nirwahyudi
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing
Asisten Kepala Divisi Foto: Hariyanto

Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Sadyo Kristiarto, Santhy M. Sibarani, Soelistijono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari
Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andreas Timothy, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hulwan Muzayyin, Aries Wijaksena, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Bunga Pertiwi, Cornelius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Edna Agitta Meryynanda, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Fidel Ali Permana, Gayatri Suroyo, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heru Prihmantoro, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nesty Trioka Pamungkas, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Tutus Subronto, Usman Iskandar, , Zubaedah Hanum

Biro Redaksi: Dede Susianti **(Bogor)** Eriez M. Rizal **(Bandung)**; Kisar Rajagukguk **(Depok)**; Firman Saragih **(Karawang)**; Sumantri Handoyo **(Tangerang)**; Yusuf Riaman **(NTB)**; Baharman **(Palembang)**; Parulian Manulang **(Padang)**; Haryanto **(Semarang)**; Widjajadi **(Solo)**; Faishol Taselan **(Surabaya)**

METROTVNEWS.COM
Head of Metrotvnews.com: Asep Setiawan
Assistant to Head: Jemmy Bagota
News: Tjahyo Utomo, Khudori
Kanal/Social Media: Victor JP Nababan
Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Dendi Suharyana, Deni Fauzan, Edwin Tirani, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Patna Budi Utami, Rizky Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Rina Garmina, Nurtjahyadi, Afwan A, Andhini, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari, Rita Ayuningtyas, Satwika

DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)
Asisten Kepala Divisi: Budiana Indrastuti, Mochamad Anwar Surahman
Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe

CONTENT ENRICHMENT
Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Devi Asriana, Gurit Adi Suryo
Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto

ARTISTIK
Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas
Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi
Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi
Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman

PENGEMBANGAN BISNIS
Senior Kepala Divisi Sales & Marketing: Amdoni Nuzhaki Zakir
Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri
Kepala Divisi Marketing Support & Publishing: Andreas Sujiyono
Asisten Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R
Perwakilan Bandung: Ahmad Harun (022) 4210500; **Surabaya:** Tri Febrianto (031) 5667359; **Yogyakarta:** Andi Yudhanto (0274) 523167.
Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, **Telepon/ Fax Iklan:** (021) 5812107, 5812113, **Telepon Sirkulasi:** (021) 5812095, **Telepon Distribusi:** (021) 5812077, **Telepon Percetakan:** (021) 5812086, **Harga Langganan:** Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, **No. Rekening Bank:** a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, **Diterbitkan oleh:** PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, **Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:** Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, **Telepon:** (021) 5812088 (Hunting), **Fax:** (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, **Percetakan:** Media Indonesia, Jakarta, **ISSN:** 0215-4935, **Website:** www.mediaindonesia.com,

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

Member of MEDIA GROUP